◆ MINORITAS MUSLIM ◆
ROHINGYA DI INDONESIA

◆ Eksistensi, Pandangan Lokal dan Stigma tanpa Kewarganegaraan ◆

Indonesia merupakan negara yang menerima pengungsi asal Myanmar “Etnis Rohingya”, meskipun mereka tidak memiliki kewarganegaraan (*statelessness*). Setidaknya ada dua alasan umum Indonesia menerima pengungsi Rohingya di Indonesia diantaranya alasan kemanusiaan dan kesamaan Identitas Islam. Mulai tahun 2019 gelombang besar pengungsi Rohingya datang ke Indonesia melalui jalur laut. Mereka kabur dari Myanmar akibat pengusiran secara paksa oleh otoritas Myanmar, meskipun menurut mereka etnis Rohingya sudah ada sejak lama menetap disana. Mereka melarikan diri dengan menggunakan perahu kayu seadanya yang diisi oleh puluhan pengungsi. Beberapa media menyebut mereka sebagai “Manusia Perahu” yang terombang-ambing di lautan lepas selama berbulan bulan dan ditemukan oleh nelayan Indonesia dalam kondisi kelaparan, sakit bahkan meninggal dunia. Selama di Indonesia mereka ditempatkan di rumah singgah sementara (*community House*) atau di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan memunculkan beragam persoalan baik itu secara struktural maupun kultural, sebab sudah ada pengungsi Rohingya yang menetap selama lebih dari sembilan tahun di Indonesia meskipun mereka dijanjikan untuk diberangkatkan ke negara ketiga oleh UNHCR dan IOM.

Buku ini merupakan hasil riset yang akan menyajikan fakta-fakta sosial dan problematika pengungsi Rohingya di Indonesia dengan pendekatan keilmuan Sosiologi Agama. Eksistensi pengungsi Rohingya menjadi minoritas diantara masyarakat Indonesia sehingga melakukan akulturasi dengan budaya lokal agar tetap mampu bertahan hidup dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang multi agama dan budaya. Selain itu, juga ditemukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia (WNI) yang berujung sulitnya mengurus administrasi kependudukan untuk anak dalam mengakses pendidikan, pandangan masyarakat dan stigma tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) serta tidak adanya masa depan untuk mereka selama menetap di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi referensi untuk *Policy Paper* dan *Policy Brief* dalam mengurai persoalan pengungsi di Indonesia khususnya Rohingya.

Eksistensi, Pandangan Lokal dan Stigma Tanpa Kewarganegaraan ◆ Minoritas Muslim Rohingya di Indonesia ◆ Irwansyah ◆ Rholand Muary

◆ IRWANSYAH ◆

◆ RHOLAND MUARY ◆

◆ MINORITAS MUSLIM ◆
**ROHINGYA
DI INDONESIA**

◆ Eksistensi, Pandangan Lokal dan Stigma tanpa Kewarganegaraan ◆

Minoritas Muslim Rohingya di Indonesia (Eksistensi, Pandangan Lokal dan Stigma Tanpa Kewarganegaraan)

**Dr. Irwansyah, M.Ag
Rholand Muary, M.Si**

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**Minoritas Muslim Rohingya di Indonesia
(Eksistensi, Pandangan Lokal dan Stigma Tanpa
Kewarganegaraan)**

Penulis:

Dr. Irwansyah, M.Ag
Rholand Muary, M.Si

ISBN : 978-623-315-894-7

Editor:

Wiwit Kurniawan

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Eka Safitry

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “ **Minoritas Muslim Rohingya di Indonesia (Eksistensi, Pandangan Lokal dan Stigma Tanpa Kewarganegaraan)**”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Krisis pengungsi Rohingya akibat aksi genosida di Myanmar telah menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan kelompok minoritas etno-religius ini resmi mengalami diskriminasi yang berujung pada pengusiran paksa oleh pemerintah Myanmar pada tahun 1982 dengan keluarnya Undang-Undang (UU) kewarganegaraan yang menyatakan menolak kewarganegaraan Rohingya atau tidak diakui sebagai salah satu etnis resmi di Myanmar. Maka, etnis Rohingya terpaksa mengungsi dari negaranya menuju negara lain termasuk Indonesia.

Kajian ini menunjukkan bahwa sikap tokoh agama di Indonesia cenderung menerima keberadaan etnis Rohingya karena ada kesamaan identitas keagamaan dan atas nama kemanusiaan meskipun belum ada solusi jangka panjang mengenai masa depan mereka. Selain itu, etnis Rohingya di Indonesia sebagai stateless (tanpa kewarganegaraan) mengalami proses akulturasi, stigmatisasi, perkawinan dengan warga negara Indonesia (WNI), dan membangun strategi bertahan hidup karena sudah ada yang menetap selama lebih dari delapan tahun di Indonesia. Kesimpulannya, etnis Rohingya selama di Indonesia mengalami kondisi ketidakpastian dalam hidupnya karena tidak memiliki status kewarganegaraan dan berharap diberangkatkan ke negara ketiga oleh UNHCR.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan keilmuan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Krisis Muslim Rohingya	7
B. Persoalan Pengungsi Muslim Rohingya	9
C. Berbagai Kajian tentang Etnis Rohingnya dan Krisis Pengungsi Rohingnya.....	15
BAB II INTERAKSI DAN ADAPTASI SOSIAL	22
A. Teori Stuktural Fungsional.....	22
B. Konsep Interaksi Sosial.....	24
C. Konsep Adaptasi Sosial	25
BAB III IDENTITAS SOSIAL DAN MONORITAS ETNIS- AGAMA	28
A. Konsep Identitas Sosial	28
B. Minoritas Etnis dan Agama	30
BAB IV GAMBARAN MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA.....	32
A. Profil Muslim Rohingya di Indonesia	32
B. Genealogi dan Sejarah Etnis Rohingya.....	38
C. Identitas Etnis Muslim Rohinya	44
D. Masyarakat Tanpa Kewarganegaraan.....	51
E. Sebaran Rohingya di Indonesia	54
BAB V PEMANGKU KEPENTINGAN PENGUNGSI ASAL LUAR NEGERI.....	58
A. United Nations High Comisioner for Refugees (UNHCR)	58
B. International Organization of Migran (IOM)	64
C. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)	66

BAB VI RESPON UMAT BERAGAMA DAN EKSISTENSI	
ROHINGYA.....	71
A. Pengungsi di Mata Umat Beragama.....	71
1. Makasar.....	71
2. Medan	80
3. Aceh.....	86
B. Stigma Masyarakat Tanpa Kewarganegaraan	91
C. Interaksi Sosial dengan Masyarakat Lokal	95
D. Perkawinan Campuran dengan Masyarakat Lokal....	101
E. Akulturasi Budaya	106
F. Kemampuan Bertahan Hidup	108
BAB VII PENUTUP	111
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Krisis Muslim Rohingya

Muslim Rohingya merupakan entitas yang ramai dibincangkan di Indonesia, namun ramainya perbincangan entitas itu di ruang publik tidak berbanding lurus dengan pengetahuan banyak orang tentang muslim Rohingya itu sendiri. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan bertanya kepada 100 orang responden yang dipilih secara acak, keseluruhannya mengaku akrab dengan istilah “Muslim Rohingya,” tapi hanya 20-an persen saja yang pernah berinteraksi dalam berbagai varian.

Di Indonesia, keberadaan Muslim Rohingya mulai ramai dibincangkan sejak tahun 2015, meskipun sesungguhnya krisis yang dialami etnis minoritas di Myanmar ini sudah terjadi jauh sebelum itu. Beberapa sumber menyebutkan krisis yang menimpa Muslim Rohingya sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1978, di mana terdapat 200.000 jiwa etnis Rohingya dipaksa mengungsi ke Bangladesh melalui Operasi Naga Min (ONM). Dalam operasi yang sama, tidak kurang dari 1.700 Muslim Rohingya terbunuh akibat tidak bisa menunjukkan identitas diri (Mitzy, 2014:156).

Perbincangan tentang Muslim Rohingya di Indonesia mulai ramai sebenarnya terjadi pada gelombang krisis berikutnya. Peneliti Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, Simela Victor Muhamad, menyebutkan eksodus etnis Rohingya dari Myanmar dengan menggunakan perahu bukanlah fenomena baru. Gelombang pengungsian ini terjadi secara besar-besaran saat konflik sektarian antara warga minoritas Muslim Rohingya dengan mayoritas

Buddhis di negara bagian Rakhine di Myanmar pada tahun 2012 semakin memburuk. Pada masa itu, ditemukan lebih dari 200 warga Rohingya yang tewas, dan sekira 140.000 jiwa lainnya digiring ke kamp-kamp penampungan (Muhamad, 2015:6).

Krisis pengungsi Rohingya akibat aksi genosida di Myanmar pada gilirannya mulai menarik perhatian dunia. Kekerasan yang telah menewaskan ratusan bahkan menelantarkan lebih dari 140.000 jiwa itu mulai dibincangkan secara serius. Keberadaan kelompok minoritas *ethno-religius* ini resmi mengalami diskriminasi dari Pemerintah Myanmar sejak tahun 1982 akibat diterbitkannya Undang-Undang (UU) kewarganegaraan yang menolak akses kewarganegaraan minoritas Muslim Rohingya; dengan kata lain mereka tidak diakui sebagai salah satu etnis resmi di Myanmar.

Padahal dalam aspek kependudukan, Myanmar seyogianya merupakan Negara multietnis. Tujuh puluh persen penduduknya merupakan suku Burma, Bamar, Shan, Kachin, Kayin (Karen), Kayah (Karenni), Chin dan Mon. Namun demikian, dari berbagai etnis yang disebutkan di atas, Muslim Rohingya merupakan kelompok minoritas yang tinggal di daerah Arakan, satu kawasan yang berbatasan dengan Bangladesh. Jika dilihat dari sudut pandang agama yang dianut masyarakat, 75 persen penduduk di Myanmar menganut agama Budha, dan terdapat juga masyarakat beragama Kristen, Islam dengan sebaran 20-an persen, Hindu, dan animisme.

Kondisi Muslim Rohingya sebagaimana disebutkan di atas untuk sementara dapat disimpulkan sebagai akibat dari kondisi jumlah mereka yang tergolong minoritas. M. Arnold Rose dan B. Caroline Rose, dalam sebuah buku berjudul *Minoritas Problems*, menyebutkan berbagai masalah yang sesungguhnya tidak diharapkan sering terjadi terhadap kelompok minoritas, seperti termarginalisasi secara politik, kesulitan berintegrasi dalam negara bangsa, secara sosio-kultural tersegregasi, dan terhimpit kesulitan ekonomi. Pada

gilirannya kaum minoritas muslim membangun dan memelihara konsep, identitas dan jati diri mereka sendiri.

Keberadaan masyarakat Muslim Rohingya dapat dikatakan sebagai bangsa tanpa negara. Mereka memiliki identitas namun tidak punya *power* dan struktur pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan sebagai warga negara kepada mereka. Bahkan mereka berada dalam kondisi tertekan dan mendapatkan beragam perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar. Bisa dikatakan mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mengakses hak mereka yang paling mendasar sekali pun, termasuk untuk hidup akibat menjadi target pembunuhan oleh pemerintah (Gill, 2015).

Selain itu, muslim Rohingya juga dilarang untuk bergerak dari satu wilayah ke kawasan lainnya di kawasan Myanmar. Apalagi untuk pergi ke luar negeri secara legal, seperti halnya melaksanakan haji. Hal inilah yang membuat mereka melarikan diri pergi ke negara lain yang mereka nilai lebih aman. Cara mereka pergi pun juga tidak memiliki standar keselamatan. Terkadang satu perahu kecil diisi oleh puluhan orang termasuk wanita dan anak-anak. Kondisi inilah yang terkadang menyebabkan mereka disebut sebagai manusia perahu (Gill, 2015).

B. Persoalan Pengungsi Muslim Rohingya

Pada bulan Mei 2015, muncul gelombang pengungsi Rohingya untuk keluar dari Myanmar. Awalnya gelombang pengungsi berasal dari kapal-kapal perairan laut Andaman dan Selat Malaka ditolak untuk masuk oleh tiga negara yaitu, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Namun para nelayan terpaksa membawa pengungsi ke Indonesia, termasuk di Aceh, sebab saat ditemukan, para pengungsi dalam kondisi kritis karena kelaparan dan dehidrasi setelah kapal rusak tak bermesin yang ditumpangi oleh para pengungsi asal Bangladesh dan Etnis Rohingya tersebut kehabisan logistik dan terombang-ambing di tengah laut (Trianita, 2015).

Melihat kondisi itu, Indonesia beserta Malaysia dan Thailand pada gilirannya bersepakat untuk memberikan tempat penampungan sementara dalam upaya penanggulangan pengungsi Muslim Rohingya.

Pemerintah Thailand sendiri menyediakan pemukiman sementara yang terdiri dari 9 kamp di Thailand-Myanmar dan bersedia melakukan *resettlement*. Langkah lain yang diambil Pemerintah Thailand dalam upaya untuk menangani pencari suaka dan pengungsi Rohingya, adalah meliputi peran pemerintah Thailand dalam aspek *basic needs* (kesehatan, ekonomi dan pangan), aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek keamanan individu (Augita, 2017:36).

Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyebut ada 1.346 total pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang masuk ke perairan Indonesia dalam bulan Mei 2015. Para pengungsi ditampung di dua tempat wilayah Aceh. Kedatangan gelombang pertama sebanyak 558 pengungsi, lalu disusul dengan tiga gelombang kedatangan berikutnya masing-masing 664 orang, 47 orang, dan 96 orang. Banyaknya pengungsi asal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk Muslim Rohingya, mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri tentang peran pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan badan PBB yang mengurus pengungsi UNHCR dan organisasi migrasi internasional (IOM) untuk menangani mereka (Rappler, 2015).

Aceh dan Makassar merupakan lokasi pertama para pengungsi Rohingya ketika tiba di Indonesia. Sikap Indonesia menerima para pengungsi Rohingya ditunjukkan karena adanya kesamaan identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi norma HAM, sedangkan pengungsi Rohingya merupakan korban pelanggaran HAM di negara asalnya (Moy.dkk, 2016:73)

Di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, pengungsi Rohingya tinggal di *community house*, antara lain terletak di Hotel Beraspatih Medan, Jln .Jamin Ginting; Hotel Pelangi, Jalan Bunga Cempaka; dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan. Hingga tahun 2018, beberapa pengungsi dari Myanmar sudah ada yang menetap di pengungsian ini sekira empat tahun, dan beberapa juga sudah mendapatkan suaka politik dari Amerika; Australia; dan Eropa. Meski demikian, tidak sedikit pula yang harus menunggu dan belum mendapatkan kepastian pemberangkatan oleh UNHCR dan IOM ke negara ketiga. Hal yang sama juga dirasakan oleh muslim Rohingya lain yang berada di lokasi pengungsian Aceh dan Makassar.

Dalam pengamatan terbatas, Muslim Rohingya di lokasi penampungan tampak—jika bukan harus—berinteraksi dengan imigran lain, di antaranya dari Bangladesh; Sri Lanka; Iran; dan Suriah. Selain itu mereka juga berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, baik dengan berkomunikasi secara verbal maupun non verbal karena ada kendala bahasa dan budaya negara dari asal. Kehidupan sosial mereka yang baru di Indonesia juga diikuti dengan proses interaksi dengan masyarakat sekitar yang tanpa sadar telah membangun strategis adaptasi untuk dapat bertahan hidup di antara status kewarganegaraan yang belum jelas, termasuk masa depan mereka dan pendidikan anak-anaknya.

Proses interaksi sosial mereka juga tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, namun juga diwarnai dengan konflik sosial. Pada Desember 2013 yang lalu, 14 muslim Myanmar divonis 9 bulan penjara oleh pengadilan negeri Medan akibat perkelahian dengan nelayan imigran Myanmar, yang berujung pembunuhan kepada delapan imigran Myanmar yang beragama Budha (BBC,2013); menikah dengan warga negara Indonesia (WNI) sekitar; serta menggunakan Narkoba. Begitu juga dengan kebijakan *International of Migrations (IOM)* di mana para pengungsi yang datang di atas bulan Maret 2018 tidak lagi menyediakan kebutuhan dasar pengungsi yang

datang dari luar negeri. Beberapa pengungsi Rohingya yang datang hidupnya harus bergantung dari pihak lain.

Namun disisi lain, dalam membangun sistem sosial di antara masyarakat Indonesia yang multikultural, etnis Rohingya yang beragama Islam juga menyesuaikan kehidupan beragamanya di lokasi mereka menetap dengan proses akulturasi di samping merawat tradisi keagamaan yang sudah turun-temurun mereka lakukan. Begitu juga dengan etnis lain dan agama yang berbeda dengan mereka. Sementara dalam urusan mendapatkan suaka politik, Muslim Rohingya juga merasakan perlakuan yang tidak adil dibandingkan pengungsi dari negara lain.

Kondisi Muslim Rohingya sebagaimana dipaparkan di atas mencerminkan keadaan suaka yang diberikan atas nama kemanusiaan. Dengan kata lain, berbagai kebijakan yang dilakukan beberapa Negara, termasuk Indonesia, di mana Muslim Rohingya diperlakukan lebih manusiawi ketimbang di daerah asalnya, didasarkan pada alasan kemanusiaan. Padahal dari perspektif yang berbeda, seyogianya banyak muncul dinamika perbincangan publik yang dikaitkan dengan permasalahan agama.

Sebagaimana lazim diketahui, krisis yang dihadapi Muslim Rohingya di Myanmar yang belakangan menjadi isu global, dibaca dalam dimensi yang lain oleh banyak pihak. Misalnya saja, krisis ini dipandang sebagai konflik di antara Islam dengan Buddha. Pada tahun 2017 misalnya, warga Myanmar yang didominasi oleh penganut agama Buddha, melakukan demonstrasi untuk mendukung Aung San Suu Kyi. Dukungan tersebut diberikan akibat derasnya arus demonstrasi dan kritik dunia internasional terhadap pimpinan Myanmar itu. Seorang warga misalnya, berdasarkan sumber informasi, mengungkapkan bahwa isu krisis kemanusiaan yang ramai dibicarakan publik merupakan kesalahan informasi yang menyebar di media (Merdeka.com, 2017).

Masih merujuk pada sumber yang sama, kebanyakan warga Myanmar yang menganulir pembantaian terhadap muslim Rohingya menganggap etnis Rohingya sebagai "Orang Bengali," merupakan istilah untuk menyebutkan imigran ilegal. Selain itu, mereka juga menganggap orang-orang Rohingya merupakan "teroris" bagi penduduk asli.

Martin Smith, peneliti yang banyak membuat laporan tentang Burma sejak 1980-an, mengangkat satu tulisan sebagai bahan dalam *Conference of Burma Centrum Nederland*, yang juga menampakkan sedikit dimensi agama dalam konflik antara Budha dan Islam di Burma. Martin menyebutkan bahwa ia banyak menerima informasi dari pengungsi mengenai keberadaan mereka yang tidak pernah memiliki Kartu Registrasi Nasional, atau disita oleh otoritas imigrasi selama operasi 1978. Perlakuan ini dianggap sebagai "kesengajaan" yang didiskriminatif. Intensitas kekerasan itu semakin meningkat di bawah hukum kewarganegaraan yang keras yang kemudian disahkan oleh pemerintah Ne Win pada tahun 1982 (Smith, 1995:10). ‘

Di Indonesia sendiri, sebagian pihak memandang krisis Rohingya sebagai isu agama. Sebuah tulisan yang diangkat Fajri Matahati Muhammadin, dosen Departemen Hukum Internasional Universitas Gajah Mada, yang dimuat di *Harian Republika*, misalnya, menganulir anggapan krisis Rohingya sebagai bukan konflik agama. Menurutnya, narasi "bukan konflik agama" sering digunakan untuk menyanggah pihak-pihak yang membawa isu agama dalam persoalan Rohingya; walaupun pendekatan yang lebih kritis akan mendapati kesimpulan yang berbeda (Muhammadin, 2017).

Mahmuddin menguatkan anggapan di atas dengan argumentasi bahwa di dalam Islam, mempertahankan diri dari serangan merupakan "jihad." Dalam kasus penindasan terhadap Muslim Rohingya bahkan hukumnya menjadi *fardhu 'ain* bagi umat Islam di sana. Bukan hanya dalam perspektif Islam saja; jika perspektif agama Buddha juga dipahami, pada dasarnya salah satu elemen besar penggerak kebencian yang

mengakibatkan aksi kekerasan terhadap Muslim Rohingya adalah sekelompok biksu beragama Buddha yang dipimpin oleh Biksu Wirathu (Mahmuddin, 2017).

Senada dengan argumentasi di atas, penulis lainnya, Fika Komara, mengajukan dua bantahan terhadap pihak yang menganggap isu Rohingya bukan merupakan permasalahan agama. Pertama, bahwa tugas konstitusional sebuah negara dari perspektif Islam adalah menjaga darah, harta, kehormatan warga negaranya, serta mempertahankan tanah Islam; karenanya permasanlah nyawa Muslim Rohingya merupakan permasalahan Islam, yang tentu saja berkaitan dengan masalah agama. Kedua, masalah perebutan pengaruh kuasa adidaya, Geopolitik energi, akses sumber daya alam di Rakhine; merupakan masalah agama.

Ada banyak anggapan yang sama, terutama dari kalangan umat Islam Indonesia, yang memandang bahwa krisis Muslim Rohingya merupakan permasalahan agama. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya kajian tentang bagaimana respon umat beragama terhadap muslim Rohingya di Indonesia.

Kajian dalam buku ini bertujuan mengetahui respon umat beragama terhadap Muslim Rohingya di Indonesia, yang meliputi Sejarah, Profil, Interaksi sosial Muslim Rohingya di Indonesia; Sikap masyarakat lokal dengan kehadiran Muslim Rohingya di Indonesia; serta Stigma Sosial yang muncul terhadap Muslim Rohingya di Indonesia.

Secara teoretis, penekanan dari fokus permasalahan di atas diharapkan dapat melahirkan kajian sosiologi agama guna memahami eksistensi sosial-keagamaan dari muslim Rohingya itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti ilmu sosiologi maupun sosiologi agama. Pada tataran yang lebih praksis, buku ini juga diharapkan menyumbang ide dan pemikiran untuk Pemerintah Indonesia, khususnya dalam penanganan imigran maupun pengungsi akibat konflik di negara-negara dunia, guna membangun sistem bertahan hidup dalam konteks negara dan kemanusiaan.

C. Berbagai Kajian tentang Etnis Rohingnya dan Krisis Pengungsi Rohingnya

Penelitian Hartati (2013) dalam studi eksistensi etnis Rohingnya di tengah tekanan pemerintah Myanmar menjelaskan sebelum gelombang pengungsi minoritas muslim Rohingnya masuk ke Indonesia, setidaknya terdapat tiga level akar konflik yang terjadi. Pertama, Level sistemik, di mana pemerintah Myanmar tidak mengakui status kewarganegaraan etnis muslim Rohingnya, walaupun mereka sudah hidup secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Akibatnya Etnis Rohingnya dianggap sebagai penduduk ilegal tanpa status.

Selain masalah pengakuan tersebut, ada konspirasi antara pemerintah Junta dengan pihak korporasi asing yang akan mengeksplorasi minyak dan gas bumi. Korporasi tersebut dari AS, China, dan lain-lain. Ada kesan konflik tersebut sengaja dibiarkan agar kepentingan pemerintah bisa terwujud. Kedua, Level Domestik, di tengah gelombang demokratisasi yang mengemuka, Myanmar dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Adanya kepemimpinan Militer di satu sisi keamanan negara terjamin, tetapi disisi lain seperti mekanisme berkenegaraan jelas menjadi tidak sehat, otoritarianisme menyeruat, dan rakyat diteburi teror-teror penculikan, penahanan, dan bahkan pembunuhan. Pemerintah Junta militer pada kenyataannya tidak mampu meredam konflik antara kedua etnis tersebut, sehingga cenderung berlarut-larut bahkan dalam waktu yang dekat konflik terjadi lagi yang menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran.

Ketiga, Level Persepsi, muncul sentimen anti Muslim di Myanmar telah berlangsung berabad-abad. Diskriminasi pada warga Islam ini secara nyata terbukti dengan penolakan pemerintahan Presiden Thein Sein atas status etnis tersebut. Pemerintah Myanmar hingga kini belum mengakui etnis Rohingnya sebagai warganya. Kulit etnis Rohingnya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan

budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2015) pengungsi dan pencari suaka asal Afganistan di Makasar, dengan masyarakat lokal dimulai dengan mempelajari budaya setempat khususnya bahasa dan kode-kode berbicara yang di pakai oleh masyarakat lokal agar terjadi saling pengertian di antara keduanya. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat lokal, para pengungsi dan pencari suaka Afganistan ini berinteraksi dalam dua cara, yakni secara verbal dan nonverbal. Kedatangan para pengungsi dan pencari suaka di kota Makassar pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi dimana mereka harus mulai menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang berbeda dengan negara asal mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Pardede (2017) tentang strategi adaptasi Rohingya di lokasi pengungsian di Medan, menunjukkan adanya proses interaksi sebagai bagian dari adaptasi sosial etnis Rohingya dengan masyarakat lokal yang jaraknya tidak jauh dengan lokasi penampungan. Mereka juga melakukan pembauran budaya dan bahasa agar memudahkan dalam berkomunikasi dan membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Walaupun tidak semua dari mereka yang mampu berbahasa Indonesia dan sedikit-sedikit berkomunikasi melalui bahasa Inggris dengan pengungsi lain dari luar negara Myanmar.

Penelitian yang dilakukan Rehayati (2011) tentang minoritas muslim di Filipina. Jumlah muslim di Filipina kurang lebih 7 juta penduduk artinya mencapai 10 % dari total jumlah penduduk Filipina yang mayoritas beragama Katolik. Minoritas muslim Filipina mengalami konflik dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara sehingga memunculkan gerakan perlawanan dari beberapa kelompok muslim Filipina yang diantaranya, *Moro National Liberation Front (MNLF)*, *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *Abu Sayyaf (Bearer of the Sword)*, *Organisation of the Islamic Conference (OIC)*.

Perjuangan minoritas muslim di Filipina memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan dalam kehidupan ini. Konflik yang dominan terjadi adalah konflik agama. Faktor sosiologis-kultural yang menyebabkan konflik antara mayoritas dengan minoritas. Banyak analisis yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, problem riil yang paling menonjol dan menjadi penyebab utama peristiwa konflik, kerusuhan dan kekerasan antara suku dan pemeluk agama, sebagaimana yang dipercaya banyak pihak, sering kali adalah karena kemiskinan yang dilahirkan dari perlakuan yang tidak adil memunculkan kesenjangan ekonomi dan friksi sosial yang tajam. Faktor-faktor ini telah menanamkan rasa dendam politik kaum minoritas kepada kaum mayoritas yang bertindak semena-mena.

Penelitian yang dilakukan oleh SUAKA 2016, menunjukkan adanya diskriminasi yang diterima oleh pengungsi Rohingya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan misalnya akta lahir anak dan pernikahan. Akibat dari ketidakjelasan status kewarganegaraan, WNI yang menikah dengan pengungsi lintas batas, khususnya kebangsaan Rohingya, tidak dapat dicatatkan pernikahannya. Dari seluruh responden dengan kategori rumah tangga perkawinan campur yang diwawancarai oleh SUAKA, tidak ditemukan satu pun perkawinan yang tercatat di KUA. Sebaliknya, temuan SUAKA di Makassar menunjukkan bahwa perkawinan yang terlanjur dicatatkan di KUA, dibatalkan.

Hal ini pula yang menjadi faktor bahwa seluruh keluarga perkawinan campur ini tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Dan apabila WNI perkawinan campur ingin memproses KK, maka ia tidak dapat mencatatkan pasangannya yang merupakan pengungsi lintas batas. Uniknya, mendapatkan pengakuan bahwa apabila keluarga perkawinan campur ini ingin mendapatkan KK, maka si istri harus membuat surat keterangan cerai.

Akibat dari ketiadaan pencatatan perkawinan bagi WNI yang menikah dengan pengungsi lintas batas, menyebabkan anak hasil perkawinan campur tersebut kesulitan untuk mendapatkan Akta Kelahiran. anak-anak pengungsi lintas batas yang lahir di Indonesia maupun yang lahir dari perkawinan campur antara pengungsi dengan perempuan Indonesia, tidak mendapatkan Akta Kelahirannya. Anak-anak tersebut hanya mendapatkan surat keterangan lahir dari tenaga medis yang menangani kelahiran mereka.

Kelurahan setempat juga tidak merasa berwenang untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di Indonesia dari perkawinan murni pasangan pengungsi lintas batas maupun pasangan campur ini. Sebaliknya, SUAKA menemukan satu kasus di Medan di mana Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Bukan Warga Negara Indonesia bagi anak yang lahir di Indonesia hasil dari perkawinan campur antara perempuan Indonesia dengan pengungsi.

Ketiadaan Akta Kelahiran tentunya mempersulit anak-anak tersebut -bahkan anak-anak yang lahir di Indonesia dan dari perempuan Indonesia, dalam mengakses pendidikan publik, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Apabila mengacu pada Prinsip No. 6 dari Prinsip-prinsip untuk Anak-anak yang Berpindah-pindah, maka tidak ada anak yang tidak sah - anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Sistem perlindungan anak nasional harus mampu menjamin bahwa hak anak-anak yang berpindah-pindah terpenuhi.

Di beberapa *shelter* di Makassar, Sekolah Dasar terdekat menerima anak-anak pengungsi Rohingya untuk bersekolah. Namun dalam beberapa bulan bersekolah, umumnya anak-anak Rohingya ini tidak melanjutkan sekolah karena menerima perlakuan buruk dari kawan-kawannya di sekolah. Ada anak-anak Rohingya yang mengalami luka fisik cukup serius seperti kepala bocor, luka-luka dan lebam. 151 Anak-anak ini juga menerima kata-kata kasar dan sikap intimidatif

dari kawan- kawannya karena ia bukan orang Indonesia. Namun sekolah tidak dapat mengatasi hal ini sehingga anak-anak Rohingya ini terpaksa keluar dari sekolah.

Tidak ada pertolongan berarti yang dapat diperoleh untuk tetap melanjutkan sekolah tanpa mengalami kekerasan, baik dari Imigrasi, IOM, sekolah itu sendiri, ataupun orang tua siswa. Meski demikian, ada pula kawan-kawan mereka yang berperilaku baik. Di Medan, anak-anak Rohingya cenderung menutup diri dari pergaulan dengan masyarakat lokal. Sehingga tidak banyak interaksi yang dilakukan oleh anak- anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tieken (2013) menyebutkan anak-anak pengungsi Rohingya di Indonesia mengalami deprivasi hak-hak mendasar, seperti yang ia alami di Myanmar. Terlepasnya anak dari eksklusi sosial yang terjadi di teritori Myanmar tidak serta merta memberikannya potensi penuh untuk melanjutkan hidup. Menurut UNHCR Indonesia, tidak terdapat mekanisme yang pasti untuk memenuhi hak anak-anak pengungsi di Indonesia. Mekanisme perlindungan secara finansial ditawarkan oleh IOM dengan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Namun, solusi finansial yang diberikan oleh IOM bukanlah solusi jangka panjang yang dapat membantu kehidupan anak di masa depan Anak memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan dasar.

IOM sebagai lembaga yang menaungi anak-anak pengungsi Rohingya menyediakan pendidikan bahasa Inggris sebagai sarana kapasitas anak. Namun, pemenuhan hak pendidikan belum tentu memberikan anak sarana yang cukup untuk mengembangkan potensinya. Sesuai dengan pasal 3 Konvensi Hak Anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan dalam penentuan keputusan. Anak sebagai subjek dalam penelitian ini mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensinya yang begitu luas. Pendidikan non- formal tidak memberikan anak modal untuk berpartisipasi penuh sesuai potensinya di negara ketiga, atau